

Urbanisasi dan Kegagalan

ANGKA satu juta orang urban pasca-Lebaran tahun ini (sebagaimana diberitakan "PR", 23 Agustus 2013) yang menuju Jakarta sebagai tujuan utama dan kota-kota besar, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Batam sebagai tujuan arus urbanisasi bukanlah angka yang kecil.

Urbanisasi pasca-Lebaran menjadi penyakit *matuh* dengan argumentasi perbaikan ekonomi yang dilakukan penduduk dari desa ke kota. Mencari pekerjaan, hidup layak di kota besar, dan status sosial yang lebih baik adalah argumen klasik untuk keluar dari jerat kemiskinan. Urbanisasi dipandang tepat bagi orang yang berpikir sesaat, tanpa berpikir jauh ke depan dengan berbagai kesiapan mental dan kemampuan untuk bersaing di tengah arus metropolis yang kompetitif.

Setiap tahun kita lihat, wajah-wajah bertopeng kelam yang mewarnai hirup pikuk dan nadi perkotaan. Merekalah pencari nasib perubahan sosial yang tak jarang tersandung oleh persoalan kemampuan yang *incompatible* dengan kebutuhan nadi ekonomi perkotaan. Persoalan ini menjadi kompleks ketika peme-

rintah kota harus menggiring mereka kembali ke daerah asal. Hal ini menjadi konflik sosial ketika ada satu kepentingan yang menyulut soal kemanusiaan dan hak-hak asasi. Inilah yang dikenal dengan permanenisasi urbanisasi sistemik yang dikemudian hari menjadi komunitas tertentu dan menggeser entitas perkotaan yang asli.

Denyut nadi kota memang manis dan menarik. Gemerlap lampu menjadi daya tarik tersendiri. Aromanya tercium hingga batas-batas perdesaan yang membuat orang takjub dibuatnya. Hampir semua perkotaan menyuguhkan persoalan yang sama di atas altar sosial ekonomi yang menjanjikan satu perubahan. Namun, bukan bagi mereka yang tidak siap berkompetisi mental dan kemampuan, altar yang manis bisa menjadi bumerang.

Ada beberapa alasan mengapa terjadinya urbanisasi, yakni pertama, keterbatasan dan peluang kerja di perdesaan masih sempit. Ketidakseimbangan antara permintaan (*demand*) pasar dan pasokan (*supply*) tenaga kerja sehingga terjadi akumulasi tenaga kerja di kawasan perdesaan. Hal tersebut berdampak pula pada upah kerja di desa yang lebih kecil dibandingkan di kota.



Dadang Iskandar

Dosen Kopertis IV Jabar Banter
dpk FKIP Unpas Bandung

Kedua, adanya mitos yang melem-baga bahwa hidup di perkotaan jauh lebih enak ketimbang di desa. Inilah *success story* (kisah sukses) dari para pemudik yang pulang ke desa, di mana glamorisasi menjadi gaya hidup hedonisme. Pola pikir semacam inilah pada akhirnya memacu tingginya urbanisasi baru di kota-kota besar Indonesia.

Permasalahan lain yang muncul akibat arus urbanisasi yang tinggi, antara lain lonjakan penduduk di perkotaan tidak sesuai lagi dengan daya dukung kawasan kota. Kemudian, bertambahnya pencari pekerjaan di kota terutama yang *unskilled* dan tak kompetitif. Juga, meningkatnya jumlah permukiman kumuh di bantaran dan sela-sela perkotaan, serta meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di perkotaan, dan kelima tingginya angka kriminalitas sosial perkotaan.

Penekanan urbanisasi menjadi agenda pemerintah yang harus segera diatasi. pentingnya adalah melaksakan pembangunan secara merata kota sampai ke daerah tepian (*terland*) atau desa, peme-sumber daya, dan konsep *pr-planning* serta akses pelayanan masyarakat perdesaan per-bangun permanen sehingga mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara desa dan kota.

Dalam mengatasi persoalan ini dibutuhkan langkah strategis terutama soal peningkatan pendidikan, aksesibilitas, dan pengembangan potensial yang ki oleh desa-desa. Kalau diul-tan tentunya pada sisi pend-perlu dilakukan lebih konst-yakni upaya peningkatan pendidikan di pedesaan harus-torasi kepada kemampuan